

yang diterbitkan oleh Koran ternama di Denmark yaitu Jyllands-Posten merupakan suatu hal yang juga sangat menyinggung perasaan umat islam di Indonesia dan umat islam di seluruh dunia. Meskipun protes yang disampaikan oleh umat islam secara besar-besaran yang terjadi di Indonesia ternyata kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Denmark dalam merespon masalah tersebut tidak terlalu memuaskan apa yang diharapkan oleh umat islam di Indonesia.

Kebijakan politik dalam negeri Denmark terhadap hak kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh warga negaranya, bahkan sampai hal yang membawa kesan negative terhadap hubungannya dengan Komunitas Agama. Seperti yang dilakukan oleh Koran Jyllands Posten yang memuat karikatur nabi Muhammad dengan alasan membuat Satire terhadap adanya penyensoran diri dan tertutupnya kebebasan berbicara. Dimana tidak adanya tindakan hukum yang diambil Denmark terhadap Koran tersebut yang disadari menuai banyak kritik keras dari umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Setiap Kebijakan Politik Luar Negeri Suatu negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga dalam setiap pembuatan kebijakan perlu meninjau faktor-faktor yang lain. Terkait dengan permasalahan karikatur Nabi Muhammad SAW yang menyinggung perasaan umat islam di Indonesia tersebut yang diterbitkan oleh Koran ternama di Denmark menarik untuk dicermati mengingat hubungan Indonesia-Denmark yang selama ini telah terjalin dengan baik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas kembali ini dengan mengambil judul “ **Politik Luar Negeri**

Republik Indonesia Terhadap Denmark Dalam Kasus Karikatur Nabi Muhammad SAW ”.

B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini diharapkan akan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya :

1. Memberikan gambaran bagaimana kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia terhadap pemerintahan Denmark pasca diterbitkannya karikatur Nabi Muhammad SAW yang sangat menyinggung perasaan umat islam di Indonesia.
2. Untuk menggambarkan bahwa setiap negara melakukan hubungan dengan negara lain, sehingga masalah dalam negeri perlu ditinjau pada konteks internasional yang melingkupi suatu Negara.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Serjana S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tanggal 30 September 2005, surat kabar *Jyllands Posten* yang merupakan surat kabar terbesar di Denmark menerbitkan 12 karikatur Nabi (dapat dilihat pada lampiran) terakhir umat islam yaitu Nabi Muhammad SAW. Permasalahannya adalah bahwa kartun-kartun tersebut bagi umat Islam sedunia merupakan tindak pelecehan simbol-simbol puncak keagamaan, khususnya terhadap ~~Saya Nabi yang disintai umat islam. Dan karena demikian itu ialah melanggar prinsip~~

Universal Declaration of Human Rights (1948), khususnya Pasal 29, yang menentang pelecehan keyakinan keagamaan (*disrespect for belief*) pihak lain. Bagi kalangan Barat, penerbitan kartun tersebut masih berada dalam koridor kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari HAM, yang dengan bahasa diplomatis diklaim tidak untuk menghina umat Islam.¹

Kronologis peristiwa ini sudah cukup panjang dan diwarnai oleh aksi ketidakpuasan dari berbagai kelompok masyarakat didunia Islam. Pada akhirnya, realitas hubungan yang tidak nyaman antara dunia Islam dan Barat kembali muncul ke permukaan. Ketika deretan panjang isu-isu kontroversial yang mempertentangkan dunia Islam dan Barat masih tidak terselesaikan, peristiwa penghinaan ini justru semakin mempertajam pertentangan yang ada.

Kompleksitas ketegangan hubungan Islam-Barat ditandai bukan saja oleh sejarah perang salib yang membekas dalam, melainkan juga karena fakta pada beberapa abad terakhir ketika dunia Islam ditindas dan dipecah belah dalam gelombang penjajahan panjang. Berakhirnya penjajahan pun ternyata tetap mempertahankan hubungan asimetris dengan Barat. Negara-negara bekas jajahan tetap tertinggal dan miskin, sedangkan dunia Barat berkembang maju, dan dengan cara itu telah memimpin dan mendominasi arah peradaban global. Beberapa negara dalam dunia Islam yang kebetulan makmur karena anugerah minyak bumi, pun ternyata terjebak oleh beragam problematika sistemik internal sehingga tidak mampu

tampil sebagai pemimpin dunia Islam yang berwibawa. Padahal, beberapa negara makmur tersebut semestinya berperan membawa bendera sebagai juru bicara antar peradaban.

Dilain pihak, dunia Islam giat mengkampanyekan postur Islam sebagai agama yang cinta damai sambil terus-menerus menegaskan penentangan terhadap segala bentuk terorisme oleh siapa pun dan untuk alasan apa pun. Sudah tentu ajaran Islam menolak aksi terorisme. Bagi negara muslim moderat seperti Indonesia, ajaran islam itu sendiri juga mengedepankan karakter kemoderatan dan menganut sistem demokrasi.

Pada saat terjadinya serangan 11 September telah menempatkan Barat pada posisi atau pihak yang diserang, sedangkan dunia Islam sebagai pihak yang harus bertahan. Kasus penghinaan Nabi membalik posisi tersebut dan menempatkan dunia Islam pada posisi yang diserang, sedangkan Barat yang memulai ketegangan lebih bersikap defensif atau pihak yang harus bertahan. Meskipun begitu, posisi penyerangan terhadap dunia Islam karena krisis kartun tampak memiliki berbagai kelemahan. Dari sudut 'konsepsi' diplomasi, sekalipun kasus kartun ini secara spontan mampu mengedepankan posisi bersama guna membela Nabi Muhammad SAW, namun tidak ada suatu 'kesepakatan bersama' mengenai titik batas bagaimana dunia Islam menganggapnya selesai. Tentu saja masalah ini dipersulit oleh kenyataan bahwa reaksi Denmark, baik di tingkat pemerintah seperti ditegaskan PM Anders Fogh Rasmussen maupun kalangan editor *Jylland-Posten*, pada mulanya bersikeras

Berkembangnya opini yang sama di daratan Eropa lainnya, apakah Norwegia, Perancis dan lainnya, justru semakin mempertajam pertentangan. Belakangan, setelah melalui tekanan dari berbagai penjurur yang semakin menegaskan dampak negatif kasus kartun tersebut, pernyataan maaf pun ditawarkan, termasuk pemecatan editor harian terkait. Namun lambatnya reaksi itu sendiri telah mengakibatkan berbagai elemen dalam masyarakat Islam sulit melakukan apresiasi sesuai kepatutannya, sehingga rentetan aksi kecaman masih terus berkelanjutan.

Reaksi yang dilancarkan dunia Islam memiliki format yang beragam, bahkan sampai ke tingkat aksi yang ekstrim. Ini mencakup pernyataan keberatan secara resmi melalui jalur-jalur diplomatik, upaya mencari keadilan melalui sistem hukum di negara Eropa terkait, penggunaan 'sanksi' ekonomi di tingkat konsumen dengan memboikot produk-produk asal Denmark, penarikan mundur para duta besar dari Kopenhagen, penutupan sementara kedutaan besar di Denmark seperti yang dilakukan Libya, aksi-aksi demonstrasi damai maupun aksi berkarakter kekerasan dengan pembakaran gedung kedutaan. Warga Denmark yang berada di negara-negara berpenduduk muslim otomatis merasa terancam keamanannya.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) maupun PBB, telah menyampaikan keberatan dan protes keras negara-negara Islam. KTT Luar Biasa OKI pada awal Desember 2005 maupun Pertemuan OKI ke-57, 6 Februari lalu, menyatakan kecaman keras atas pemuatan kartun yang menghina Islam itu, mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengutuk aksi pembakaran kedutaan negara Eropa Barat di beberapa negara Islam. Selanjutnya dunia Islam bahkan berhasil menggolkan sebuah

resolusi Majelis Umum PBB yang menolak pelecehan agama, *UN Resolution on Combating Defamation of Religions*, yang ikut dikosponsori oleh Indonesia.

Benar bahwa bervariasinya ekspresi reaksi dunia Islam dipengaruhi oleh latar belakang kelompok masyarakat yang berlainan, termasuk yang berhaluan keras. Krisis kartun ini jelas menonjolkan perspektif yang bertolak belakang, yakni mempertentangkan nilai keberagamaan di mata umat Islam dengan mengatas namakan kebebasan berekspresi yang diakui, termasuk di Barat, harus berbasiskan tanggung jawab. Karikatur adalah bentuk satire yang sepele, yang telah jutaan kali dilakukan Barat untuk menstereotipkan masyarakat Islam. Namun disini, kasusnya menjadi berbeda karena kali ini diarahkan kepada Nabi, yang pelukisan wajahnya memang dilarang, sekalipun itu sebagai karya seni yang bercitarasa tinggi. Kemudian, ketika isu keberagamaan yang dipertaruhkan, maka ekspresi reaksi yang timbul dapat sangat serius.

Kasus pemuatan gambar Nabi Muhammad SAW kali ini menimbulkan efek diluar perkiraan banyak orang. Ditambah lagi sebagian dari media-media di negara-negara Barat dan Timur Tengah telah jauh terlibat dalam pro-kontra dan bahkan ikut “berperang”. Media di Iran, *Hamshahri* misalnya, telah membalas pemuatan kartun Nabi dengan menguji “kebebasan pers dan berekspresi” yang dimiliki Denmark (negara-negara Barat). Caranya dengan memuat karikatur tentang *Holocaust* pembantaian kaum Yahudi oleh Nazi Jerman yang juga dianggap sensitif bagi kaum Yahudi dan negara-negara di Eropa. Redaksi *Jyllands-Posten* mungkin sebelumnya

... “... ..” dengan memuat kartun

Nabi telah menyulut pengrusakan terhadap kedutaan-kedutaan Denmark di banyak negara. Kebangkrutan membayangi perusahaan-perusahaan besar di Denmark karena aksi boikot produk dari Denmark. Suhu pertikain antar negara memanas. Amerika, misalnya, menuding Iran dan Suriah memanfaatkan demo-demo umat Islam untuk kepentingan mereka. Kasus ini adalah kecelakaan luar biasa bagi kebebasan pers. Saat kebebasan pers dipenuhi oleh sekadar tuntutan kebebasan, profesionalisme, dan bisnis tanpa tanggungjawab, maka yang hadir adalah produk jurnalistik yang tak punya penghargaan terhadap kepentingan, hak, dan keyakinan komunitas di sekelilingnya. Kebebasan pers juga menuntut tanggungjawab. Sebab profesionalisme tidak hanya berarti memenuhi seluruh standar dan tahapan peliputan tetapi juga bagaimana wartawan mempertimbangkan kemungkinan akibat dari pemberitaannya. Inilah salah satu bentuk tanggung jawab media. Jika benar niat *Jyllands-Posten* dengan memuat kartun Nabi adalah sekadar kritik bagi umat Islam yang dinilainya 'gemar' kekerasan, namun kritik yang dibuat seharusnya tetap dalam batas penghormatan terhadap keyakinan yang mendasar bagi umat Islam, menghindari bentuk-bentuk pelecehan. *Jyllands-Posten* seharusnya tahu visualisasi fisik Nabi menjadi bentuk pelecehan berat bagi umat Islam. Enam dari kedua belas karikatur tersebut diterbitkan ulang di surat kabar Mesir, *El Faqr*, pada 30 Oktober 2005 untuk mendampingi sebuah artikel yang mengkritik keras tindakan *Posten*, namun saat itu karikatur-karikatur ini belum mendapat perhatian yang besar di luar Denmark. Hanya pada Desember 2005, saat Organisasi Konferensi Islam mulai menyatakan penentangnya, barulah kontroversi ini menghangat di dunia. Sebagian dari

Sebagai reaksi atas artikel itu, dua kartunis telah menerima ancaman pembunuhan sehingga mereka terpaksa bersembunyi. Menteri luar negeri dari sebelas negara Islam mendesak pemerintah Denmark untuk menindak surat kabar yang menerbitkan karikatur di atas dan juga meminta maaf. Perdana Menteri Denmark, Anders Fogh Rasmussen berkata, "Pemerintah Denmark tidak akan meminta maaf karena pemerintah tidak mengontrol media atau surat kabar; itu adalah pelanggaran dari kebebasan berbicara, namun Rasmussen juga berkata bahwa ia sangat menghormati penganut agama. Tentu saja saya tak akan pernah memilih untuk menggambarkan simbol keagamaan dengan cara tersebut. *Jyllands-Posten* sendiri telah meminta maaf karena telah menghina umat Muslim, namun tetap berpendapat bahwa mereka berhak menerbitkan karikatur tersebut, dengan alasan bahwa fundamentalisme Islam tidak dapat mengontrol hal-hal yang dapat diterbitkan media di Denmark.

Organisasi Konferensi Islam dan Liga Arab meminta agar PBB menjatuhkan sanksi internasional terhadap Denmark. Sementara itu, produk dari Denmark diboikot oleh konsumen di Arab Saudi, Kuwait dan negara Arab lain. Selain itu ada protes besar-besaran oleh kaum Muslim di Indonesia, Malaysia, Pakistan, negara Arab dan negara lain yang mempunyai populasi Muslim, hampir semuanya menggunakan kekerasan. Pada tanggal 4 Februari, Kedutaan besar Denmark dan Norwegia di Suriah dibakar, akan tetapi tidak ada korban jiwa. Sehari kemudian pada tanggal 5 Februari Kedutaan besar Denmark di Beirut, Lebanon juga dibakar oleh amukan massa. Akibat

... ..

Dua hari kemudian, pada 7 Februari, Iran resmi memutuskan hubungan dagang dengan Denmark. Sekjen PBB, Kofi Annan, menyatakan keprihatinannya akan peristiwa ini dan berkata bahwa "kebebasan pers" harus selalu diterapkan melalui penghormatan terhadap keyakinan agama dan ajaran seluruh agama". Vatikan mengatakan, kebebasan berekspresi tidak berarti bebas menyerang agama atau kepercayaan agama seseorang, pembuatan dan penyebaran kartun itu adalah sebuah tindakan provokasi yang sama sekali tidak bisa diterima. "Di dalam hak atau kebebasan untuk menyatakan ekspresi dan pemikiran tidaklah mencakup kebebasan yang menyakiti para penganut agama," demikian pernyataan Vatikan. Selain itu, Vatikan juga menyatakan, "Serangan yang dilakukan oleh seorang atau sebuah perusahaan media tidak seharusnya dilampiaskan terhadap lembaga publik atau negara yang terkait."²

Hubungan bilateral Indonesia dan Denmark selama ini pada prinsipnya berjalan baik. Komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk menjunjung tinggi kehidupan demokrasi, perlindungan terhadap HAM, dan penyelesaian konflik-konflik internal secara damai, mendapat perhatian besar dan disambut secara positif oleh Pemerintah Denmark. Denmark mendukung sepenuhnya integritas wilayah NKRI dengan mengutamakan pemberian otonomi yang luas kepada propinsi-propinsi yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Denmark berjalan dengan baik, total investasi Denmark di Indonesia sejak tahun 1967 – Februari 2000 mencapai US\$ 149,8 juta terdiri dari 25 proyek. Sedangkan investasi

dalam antara tahun 2000 – 2001 mencapai nilai US\$ 55,1 juta dengan pengembangan 9 proyek baru. Saat ini, Denmark menduduki peringkat dalam ke-32 daftar investor asing di Indonesia.³

Adanya karikatur Nabi Muhammad SAW tidak memberikan dampak yang cukup besar terhadap hubungan Indonesia dan Denmark. Padahal di Indonesia terjadi reaksi yang sangat besar menentang karikatur tersebut, terbukti terjadi berbagai demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia yang menuntut pemerintah agar memutuskan hubungan diplomatik dengan Denmark. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengecam keras karikatur Nabi Muhammad ini, namun beliau juga menekankan bahwa umat Muslim diharapkan menerima permintaan maaf penggambar dan jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Konferensi Waligereja Indonesia berseru supaya pemerintah Denmark mengambil tindakan. Reaksi anarkis harus dihentikan karena itu hanya akan memperkuat image Islam sebagai agama kekerasan dan teror. Sikap yang tenang dan mengutamakan dialog hendaknya lebih diutamakan. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan nota protes resmi kepada pemerintah Denmark bahkan telah memanggil Duta besar Denmark ke kantor Departemen Luar Negeri. Pemerintah mendesak agar pemerintah Denmark memperhatikan nota protes pemerintah Republik Indonesia. Selain nota protes, pemerintah Republik Indonesia juga meminta agar pemerintah Denmark menjamin hal serupa tidak terjadi lagi dimasa mendatang. Nota protes yang pertama dikirim

ketika 12 karikatur (dapat dilihat pada lampiran) diterbitkan oleh Jyllands Posten pada tanggal 30 September 2005. Nota kedua dikirim setelah ada lomba pembuatan karikatur oleh partai muda anti-pendatang dan Partai Rakyat Denmark tanggal 6 Oktober 2005.⁴

D. POKOK PERMASALAHAN

Reaksi adanya karikatur Nabi Muhammad SAW di Indonesia sangatlah besar terbukti adanya demonstrasi yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang menuntut pemerintah agar memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Denmark, menjadikan Pemerintahan Indonesia harus mengambil suatu sikap atau kebijakan untuk meredam demonstrasi tersebut. Namun kejadian ini tidak memberikan pengaruh besar terhadap hubungan Indonesia dan Denmark. Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: *“Mengapa pemerintah Indonesia tidak memenuhi tuntutan untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Denmark, namun hanya menyampaikan nota protes terhadap pemerintah Denmark?”*

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk memahami suatu permasalahan yang kita hadapi dalam hubungan internasional, kita memerlukan teori, yaitu bentuk penjelasan yang paling umum yang memberikan kejelasan mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Jadi selain dipakai untuk eksplanasi teori juga menjadi dasar prediksi.

Untuk menjelaskan permasalahan diatas, penulis menggunakan “*Teori Kepentingan Nasional dan decision Making theory dalam model Aktor Rasional*”

1. Konsep Kepentingan Nasional menurut Jack P. Plano dan Roy Olton :

*“ National Interest is the fundamental and ultimate determine that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conceptions of those elements that constitute the state’s most vital needs. The includes self preservation, independence, territorial integrity, military security and economic well being. (Kepentingan nasional adalah faktor mendasar dan pokok yang menuntun para pembuat keputusan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara merupakan suatu konsep yang masih umum dan khas dari berbagai elemen yang merupakan keinginan sangat vital yang termasuk dalam elemen tersebut adalah mempertahankan kemerdekaan, integrasi wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi).”*⁵

Diantara elemen-elemen tersebut diatas, kesejahteraan ekonomi adalah salah satu kebutuhan vital bagi sebuah negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Kesejahteraan ekonomi suatu negara berarti kesejahteraan bagi rakyat.

Secara sederhana, kesejahteraan ekonomi mewujudkan adanya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran, dan keinginan atau hasrat suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalnya dengan menggunakan cara-cara tertentu. Saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa hidup sendirian. Semua bangsa melakukan hubungan dengan negara lain dan harus memisahkan politik luar negerinya dengan

⁵ Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Third Edition, western.

politik dalam negerinya. Politik luar negeri di gunakan sebagai pengejawantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain.⁶

Politik luar negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus di capai di luar batas wilayahnya. Kepentingan suatu negara sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan politik luar negerinya. Tujuan politik luar negeri untuk mewujudkan cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

Politik Luar Negeri suatu negara adalah strategi atau serangkaian kegiatan yang terencana dan dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu negara terhadap negara lain atau terhadap suatu entitas internasional yang ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang berdefinisi interen bagi kepentingan nasionalnya. Meskipun tujuan politik luar negeri suatu negara dengan negara lain berbeda, tetapi pada umumnya berkisar pada beberapa hal, misalnya perlindungan diri sendiri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer dan ekonomi.

Kepentingan nasional melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional, dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijaksanaan yang aktual yang terencana yang ditujukan oleh suatu negara seperti yang telah dijelaskan di atas, maka kepentingan nasional Indonesia terhadap Denmark lebih ditekankan pada

kesejahteraan ekonomi karena Denmark mempunyai arti yang cukup penting bagi perekonomian Indonesia. Total investasi Denmark di Indonesia sejak tahun 1967 – Februari 2000 mencapai US\$ 149,8 juta terdiri dari 25 proyek. Sedangkan investasi dalam antara tahun 2000 – 2001 mencapai nilai US\$ 55,1 juta dengan pengembangan 9 proyek baru. Saat ini, Denmark menduduki peringkat dalam ke-32 daftar investor asing di Indonesia.

2. Aktor Rasional menurut Graham T. Allison.

“ Politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan (kepentingan nasional).”⁷ Dalam keputusan Politik Luar Negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual, perilaku pemerintahan dianalogikan dengan perilaku yang bernalar dan terkendali. Dalam analogi ini individu tersebut melalui serangkaian tahap-tahap intelektual yang merupakan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi unit analisa model pembuat keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah.

Dalam model ini di gambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria “ optimalisasi hasil “. Para pembuat keputusan itu di gambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka juga

diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin di lakukan dan semua sumber-sumber yang bisa di pakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tujuan, kepentingan atau tindakan tersebut berdasarkan bagaimana decision makers mendefinisikan situasi. Definisi situasi mencakup semua keadaan eksternal dan internal, histories dan kontemporer yang dianggap relevan oleh para pembuat kebijakan dengan masalah Politik Luar Negeri tertentu. Semua ini mungkin mencakup kejadian-kejadian penting di Luar Negeri, kebutuhan politik dalam negeri, nilai-nilai sosial / imperative ideologis, keadaan pendapat umum, ketersediaan kemampuan, tingkat ancaman atau kesempatan yang dirasakan dalam suatu situasi, konsekuensi, dan kerugian yang diramalkan dari rangkaian tindakan yang diusulkan, dan unsur waktu atau dibutuhkannya suatu situasi.⁸

Keterkaitan hubungan antara citra, persepsi dan perilaku internasional dijelaskan oleh Bruce Russett dan Harvey Starr sebagai berikut, yaitu dalam proses pembuatan keputusan politik luar negeri adalah timbulnya suatu situasi, yaitu timbulnya suatu masalah. Tetapi sebelum situasi itu muncul untuk ditanggapi oleh para pembuat keputusan, ada 3 hal yang terjadi.

1. Ditemukan suatu situasi atau permasalahan dari lingkungan yang disebut

2. Tentu ada upaya mempersepsi stimulus itu. Ini adalah proses yang ditetapkan oleh individu untuk menyeleksi, menata atau menilai informasi yang masuk tentang dunia sekitarnya.
3. Harus ada upaya menafsirkan stimulus yang telah dipersepsi itu. Persepsi dan penafsiran itu sangat tergantung pada citra yang ada dalam benak si pembuat keputusan.⁹ Didalam persepsi mengandung nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dasar serta data-data informasi yang diterima dari lingkungannya. Nilai-nilai serta keyakinan dasar yang terkandung dalam persepsi biasanya merupakan hasil sosialisasi dalam kelompok masyarakat dimana ia berada. Nilai tersebut sering menjadi standar seseorang dalam mengartikan situasi itu baik atau buruk, merupakan ancaman atau bukan, dan lain-lain.¹⁰

Dalam pembuatan suatu keputusan luar negeri, pemerintah pasti akan mempertimbangkan baik buruk dari keputusan yang di buat untuk negara dan rakyatnya. Dalam kasus karikatur ini pemerintah pasti akan membuat pertimbangan apa yang akan di lakukan walaupun banyak terjadi tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Denmark, tidaklah mudah untuk membuat suatu keputusan luar negeri karena pemerintah yang dianalogikan dengan perilaku yang bernalar dan terkendali haruslah dapat berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada dengan menggunakan kriteria “ optimalisasi hasil “

⁹ Bruce Russett & Harvey Starr, *World Politics: Menu for Choice*, dalam: Mochtar Mas'ood, *Studi*

Dalam hal ini aktor rasional yang di maksud disini adalah pemerintah yang berwenang untuk mengambil keputusan atau tindakan untuk kepentingan nasional

F. HIPOTESA

Dari permasalahan yang sudah disebutkan dalam pokok permasalahan, kemudian didukung oleh latar belakang dan kerangka pemikiran, maka hipotesanya adalah sebagai berikut :

Penulis menduga pemerintah Indonesia hanya mengirimkan nota protes dan tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan Denmark, karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Denmark akan beresiko merugikan kepentingan nasional Indonesia, sedangkan nota protes tidak akan mengganggu hubungan diplomatik maupun hubungan ekonomi antara kedua negara.

G. METODE PENULISAN

Penulisan ini bersifat eksplorasi dengan studi literature. Metode yang bersifat eksplorasi deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena realitas. maka dari itu penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan (Library Research). Dalam penyajian data, penulis menggunakan studi literature dalam pengambilan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, internet, jurnal, koran.

H. BATASAN PENULISAN

Pembahasan ruang lingkup penulisan diperlukan untuk mempersempit fokus penelitian sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak terlalu meluas

Republik Indonesia terhadap Pemerintahan Denmark setelah diterbitkannya karikatur Nabi Muhammad oleh Koran ternama di Denmark dalam kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini akan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya penulisan ini didasarkan pada kerangka teori yang sudah ada sebelumnya, dan kemudian ditariklah sebuah hipotesa yang dapat dibuktikan dengan menggunakan data empiris.

Dalam menganalisis data, penulis membuat sub-sub judul yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam pokok permasalahan, dengan menggunakan kerangka dasar pemikiran sebagai berikut :

Bab I Berisi pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul agar kita dapat mengetahui arti dari judul yang disajikan. Kemudian tujuan penelitian, lalu belakang masalah yang berisikan asal-muasal permasalahan agar kita dapat memahaminya dengan jelas. Disusul dengan pokok permasalahan yang berisi kesimpulan tentang permasalahan yang diangkat. Untuk membedah permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya maka diambilah teori yang akan disajikan dalam kerangka dasar pemikiran, sehingga dapat ditarik sebuah hipotesa. Setelah itu metode penulisan agar dapat mengetahui bagaimana penulis mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan ini. Selanjutnya batasan penulisan untuk mengetahui

penelitian menjadi lebih terarah dan tidak terlalu meluas. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Bab kedua akan memaparkan hubungan Indonesia dan Denmark. Bab dua ini akan menjelaskan Prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Eropa Barat dan akan menceritakan hubungan Indonesia dan Denmark.

Bab III Bab ini akan membahas bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW, awal terjadinya karikatur dan tuntutan terhadap Denmark yang terjadi di Indonesia dan di dunia internasional.

Bab IV Bab keempat akan membahas alasan mengapa pemerintah Indonesia tidak memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Denmark.

Bab V Bab kelima akan membahas kesimpulan dari keseluruhan